



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISA PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA
DAN KEBIJAKAN INVESTASI PEMERINTAH PADA ERA OTONOMI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PADANG**

Oleh:

**AHMAD IHSAN RASYIDI
BP. 06 151 062**

Mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi*

**PADANG
2010**



No. Alumni
Universitas

Ahmad Ihsan Rasyidi

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a) Tempat/tanggal lahir : Padang / 29 Juni 1988 b) Nama Orang Tua : Rusheriadi Abbas & Aswita c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151062 f) Tanggal Lulus : 25 Agustus 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,08 i) Lama Studi : 4 Tahun h) Alamat Orang Tua : Komp. Kampung Baru Indah No. A3 Kec. Lb. Begalung Padang

Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Kebijakan Investasi Pemerintah Pada Era Otonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang
Skripsi S1 oleh: Ahmad Ihsan Rasyidi Pembimbing Skripsi: Drs. Masrizal, M.Soc.sc

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh jumlah Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Kebijakan Investasi Pemerintah Pada Era Otonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dan perkembangan Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Kebijakan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang pada periode 1999-2009. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan data sekunder berupa data time series tahunan. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif dan signifikan antara investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang, sedangkan kebijakan investasi pemerintah berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Dilihat dari nilai adjusted R^2 sebesar 94% maka secara statistik pertumbuhan ekonomi di Kota Padang dipengaruhi oleh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Kebijakan Investasi Pemerintah, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. Oleh sebab itu investasi sektor pemerintah harus diprioritaskan untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi yang potensial di Kota Padang, dan dengan peranan investasi swasta maka pemerintah daerah hendaknya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan jumlah modal di Kota Padang.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Drs. Masrizal, M.Soc.sc	Yulia Anas, SE, M.si	Drs. Lukman, M.si

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proses demokrasi di Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru di tahun 1998 dan salah satu realisasi dari demokrasi adalah terjadinya pergantian sistem pemerintahan yang sentralistik digantikan dengan sistem yang lebih demokrasi, yaitu desentralisasi pemerintahan yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama otonomi daerah. Keberlanjutan dari sistem desentralisasi ini adalah dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, sehingga pemerintah di daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing dan secara tidak langsung peran pemerintah pusat dalam pengaturan daerah akan berkurang (Kuncoro, 2004).

Dengan semakin kuatnya peran pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut meningkat. Pemerintah daerah tentu lebih paham akan kondisi dan lingkungan daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat, maka alokasi anggaran pembangunan dari pusat atau dari daerah akan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu dibandingkan dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah lebih mengetahui akan prioritas pembangunan di daerahnya dengan harapan pembangunan di daerah akan meningkat. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pusat dan daerah, terutama dalam hal penanaman modal.

Salah satu ciri umum negara berkembang adalah kelangkaan modal. Sebab utama kelangkaan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sebenarnya sektor swasta dalam negeri mempunyai peran yang strategis yaitu dengan membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana tersebut (Tambunan, 2006).

Sekarang pemerintah tidak bisa lagi menjadi pemain dominan dalam kegiatan ekonomi dan harus menciptakan lingkungan dimana sektor swasta dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi harus dirancang secara hati-hati sehingga dapat mendukung sektor swasta dan tidak menghambat perkembangannya. Hal ini dapat terlihat nyata dengan semakin menurunnya peran pemerintah di Negara berkembang (Khan, 1996: 1)

Dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital dimana penambahan stok modal akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional (Van der eng, 2008). Hal ini berarti investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Harrod Domar menyatakan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut (Todaro, 1993).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Investasi yang ditanamkan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta memiliki peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah. Peranan tersebut dilihat dari kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan suatu daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan perekonomian Kota Padang bertumpu kepada sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri dan pengolahan serta sektor jasa. Dimana sektor-sektor ini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Padang selama beberapa tahun terakhir.
- b. Perkembangan PDRB Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir selalu menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2000 adalah 4,1% dan pada tahun 2008 sebesar 6,2%, selanjutnya turun menjadi 5,7% pada tahun 2009.
- c. Perkembangan investasi pemerintah selalu menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 73,85% dan perkembangan investasi swasta menunjukkan pergerakan naik turun dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 14,99%. Kedua investasi ini didukung oleh kebijakan investasi

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, (2000), Analisis Regresi Teori Kasus dan Solusi. Edisi 2, Yogyakarta, BPFE.
- Aritonang, Dinoroy (2008), Kebijakan Investasi Sebagai Bagian Pembangunan Ekonomi.
- Arsyad, Lincolin (1999), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta, BPFE.
- Azwar, Saifudin (2001), Metode Penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Boediono (1985), Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta, BPFE.
- BPS Propinsi Sumatera Barat (1995), *Gross Regional Domestic Product of Sumatera Barat by Industrial Origin*.
- Darwanto, Herry (2007), Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah.
- Ghozali, Imam (2001), Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, Damodar (2003), Ekonometrika Dasar. Edisi VI. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul (2002), Seri Akuntansi Publik – Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- Irawati, Dipa (2009), Kajian Perencanaan Penataan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Padang, Universitas Andalas.
- Kawengian, R V (2002), Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Dalam Sektor Pertanian dan Sektor Industry Guna Menentukan Strategi Pembangunan Ekonomi Irian Jaya.
- Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004 Tentang penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
- Khan, Mohsin S. (1996), *Government Investment and Economic Growth in developing Countries, Pakistan Developmnet Review*.